



**UNIT LAYANAN PENGADAAN
KOORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Sekretariat : Jalan Jalan Pahlawan, No. 19 Semarang, Jawa Tengah 50249
(024) 8448755

Nomor : W12.U/ 528 /ULP/03/2018 23 Maret 2018
Lampiran : 1 bendel
Hal : Pedoman pelaksanaan pengadaan alat pengolah data pendukung SIPP
(Laptop) Tahun Anggaran 2018

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Se- Jawa Tengah
Ketua Pengadilan Agama Se- Jawa Tengah
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang

Di -Tempat

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

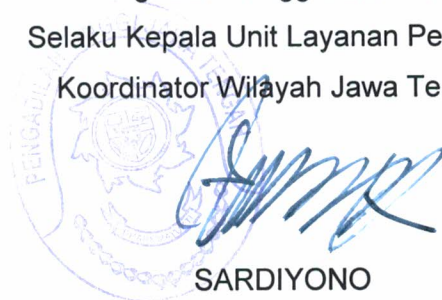
Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17/SEK/OT.01.3/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Berdasarkan perpres no. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 110 ayat 4 : **“K/L/D/I wajib melakukan e-purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam system katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I”**
2. Telah ditandatangani kontrak payung antara penyedia pada aplikasi e-catalog dengan LKPP tanggal 15 Februari 2018. Oleh karena itu baru bisa digunakan mulai tanggal 25 Februari 2018, dengan kondisi barang yang ada pada e-catalog merupakan barang sesuai dengan penawaran penyedia bulan november 2017. Sedangkan spesifikasi Mahkamah Agung baru keluar bulan Januari 2018, sehingga proses pengadaan menjadi terlambat.
3. Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran dan agar manfaat pengadaan lebih cepat dirasakan, dimohon untuk PPK satuan kerja agar segera koordinasi dengan pejabat pengadaan yg telah ditunjuk dalam hal nomor paket pada aplikasi SIRUP, nilai HPS, jadwal pengadaan dan nilai anggaran serta segera melaksanakan pengadaan alat pengolah data, paling lambat hari senin tanggal 09 April 2018.

4. Pemilihan spesifikasi barang pengadaan, PPK supaya berkoordinasi dengan pejabat pengadaan. Kemudian sebelum melakukan pembelian agar memeriksa kembali kesesuaian antara spesifikasi barang yang akan dibeli dengan spesifikasi yang dipersyaratkan Mahkamah Agung.
5. Satuan kerja diharapkan untuk memeriksa kembali Rencana Umum Pengadaan Alat Pengolah Data pada aplikasi SIRUP dan memastikan pada menu pemilihan penyedia, telah mengisi e-purchasing dengan waktu pemilihan penyedia sampai bulan April 2018, dan apabila aplikasi SIRUP belum diisi atau salah dalam pengisian maka pengadaan tidak dapat dilaksanakan.
6. PPK dan pejabat pengadaan yang belum memiliki akun pada LPSE Mahkamah Agung RI agar segera menghubungi ULP.
7. Dalam rangka monitoring pelaksanaan pengadaan alat pengolah data, satuan kerja mengirimkan **hasil cetak informasi paket** dari e-catalog ke ULP melalui email: **ulp.korwiljawatengah@gmail.com** paling lambat hari selasa, tanggal 10 April 2018.
8. Barang harus sudah diterima oleh satuan kerja dan sudah diinput dalam aplikasi SIMAK BMN paling lambat hari jum'at, tanggal 29 Juni 2018.

Sekretaris

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan
Koordinator Wilayah Jawa Tengah



SARDIYONO